



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0218 K/80/MEM/2011**

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN
DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, PERTAMBANGAN PANAS BUMI,
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2011**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2011 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);

9. Peraturan ...

[Handwritten signatures and initials]

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111);
12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 24 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Konsultasi Menteri Teknis dengan Menteri Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penghasil Tahun 2011 tanggal 2 November 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, MINYAK BUMI, DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2011.

KESATU : Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ditetapkan sebagai Daerah Penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam tahun 2011 untuk masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut :

- a. Sub sektor Pertambangan Umum tahun 2011 sejumlah 1 (satu) Provinsi, 246 (dua ratus empat puluh enam) Kabupaten dan 15 (lima belas) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- b. Sub sektor Pertambangan Panas Bumi tahun 2011 sejumlah 4 (empat) Kabupaten dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- c. Sub sektor Pertambangan Minyak Bumi tahun 2011 sejumlah 6 (enam) Provinsi, 54 (lima puluh empat) Kabupaten dan 5 (lima) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.
- d. Sub sektor Pertambangan Gas Bumi tahun 2011 sejumlah 5 (lima) Provinsi, 36 (tiga puluh enam) Kabupaten dan 7 (tujuh) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri ini.

KEDUA ...

A *22* *1*
1 *2* *1*

KEDUA : Dasar penghitungan bagian daerah penghasil adalah sebagai berikut :

- a. Sumber daya alam sub sektor Pertambangan Umum adalah :
 - 1. prakiraan penerimaan dari luran Tetap/*Landrent* yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai tahap kegiatan);
 - 2. prakiraan penerimaan dari luran Eksplorasi/luran Eksploitasi/Royalty atau luran Produksi dihitung dari jumlah produksi x tarif x harga jual.

b. Sumber daya alam sub sektor minyak bumi dan gas bumi :
Dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi dari kegiatan usaha hulu PT Pertamina EP, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan/atau Kontrak Kerja Sama lainnya di daerah yang bersangkutan.

KETIGA : Penetapan Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Sub sektor pertambangan umum :
 - 1. daerah penghasil luran Tetap (*Landrent*) adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara;
 - 2. daerah penghasil luran Eksplorasi/luran Eksploitasi/Royalty atau luran Produksi adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

b. Sub sektor pertambangan panas bumi :
Daerah penghasil sub sektor Pertambangan Panas Bumi berdasarkan parameter dan bobot penilaian yang meliputi area kontrak/prospek, infrastruktur produksi, infrastruktur penunjang, dan realisasi produksi sebagai berikut :

No.	Parameter	Bobot Penilaian
1.	Area kontrak/prospek	20 %
2.	Infrastruktur produksi : <ul style="list-style-type: none">a. Sumur produksi (10%)b. Sumur injeksi (5 %)c. Jaringan pipa (5%)d. Pembangkit (10%)	30 %
3.	Infrastruktur penunjang : <ul style="list-style-type: none">a. Infrastruktur bangunan (10%)b. Infrastruktur jalan (10%)	20 %
4.	Realisasi produksi	30 %
	Total	100 %

- c. Sub sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi :
 - 1. daerah penghasil untuk wilayah kerja pertambangan di daratan (*onshore*) adalah Kabupaten/Kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) yang menghasilkan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara;

2. daerah ...
[Handwritten signatures and initials]

2. daerah penghasil untuk wilayah kerja pertambangan di lepas pantai (*offshore*) adalah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2011

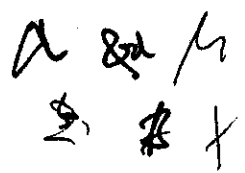
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
8. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
9. Para Gubernur yang bersangkutan
10. Para Bupati/Walikota yang bersangkutan



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 0218 K/80/MEM/2011

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2011

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL
SUB SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2011

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Eksplorasi/Iuran Eksplorasi/Royalti atau Iuran Produksi (Rp)	Iuran Tetap (Landrent) (Rp)	Jumlah (Rp)
I					
Nanggroe Aceh Darusalam					
1	Kab. Aceh Tengah	IUP	421,875,000.00	1,676,495,700.00	2,098,370,700.00
2	Kab. Aceh Selatan	IUP	-	438,322,000.00	438,322,000.00
3	Kab. Nagan Raya	IUP	354,375,000.00	82,414,900.00	416,789,900.00
4	Kab. Pidie	IUP, KK	-	269,188,000.00	269,188,000.00
5	Kab. Aceh Barat	IUP, KK	-	258,364,000.00	258,364,000.00
6	Kab. Gayo Lues	IUP	-	176,126,000.00	176,126,000.00
7	Kab. Aceh Besar	IUP	-	135,604,000.00	135,604,000.00
8	Kab. Aceh Timur	IUP	67,500,000.00	67,461,000.00	134,961,000.00
9	Kab. Aceh Barat Daya	IUP	-	70,900,000.00	70,900,000.00
10	Kab. Aceh Singkil	KK	-	53,881,600.00	53,881,600.00
11	Kota Subulussalam	IUP	-	43,029,000.00	43,029,000.00
12	Kab. Aceh Jaya	IUP	-	36,134,000.00	36,134,000.00
13	Kab. Bireun	IUP	-	25,664,600.00	25,664,600.00
14	Kab. Aceh Tamiang	IUP	-	20,000,000.00	20,000,000.00
15	Kab. Pidie Jaya	IUP	-	18,992,000.00	18,992,000.00
			-	414,600.00	414,600.00
II					
Sumatera Utara					
1	Kab. Mandailing Natal	IUP, KK	-	2,640,985,400.00	2,640,985,400.00
2	Kota Padang Sidempuan	KK	-	797,673,750.00	797,673,750.00
3	Kab. Tapanuli Selatan	KK	-	577,762,500.00	577,762,500.00
4	Kab. Tapanuli Tengah	KK, IUP	-	563,850,000.00	563,850,000.00
5	Kab. Dairi	IUP, KK	-	309,397,000.00	309,397,000.00
6	Kab. Tapanuli Utara	KK, IUP	-	176,275,250.00	176,275,250.00
7	Kab. Pakpak Bharat	IUP, KK	-	163,360,000.00	163,360,000.00
8	Kab. Karo	IUP	-	34,513,500.00	34,513,500.00
9	Kab. Humbang Hasundutan	IUP	-	16,352,000.00	16,352,000.00
			-	1,801,400.00	1,801,400.00
III					
Sumatera Barat					
1	Kab. Sijunjung	IUP	27,320,000,000.00	1,177,941,850.00	28,497,941,850.00
2	Kab. Dharmasraya	IUP	15,660,000,000.00	116,534,500.00	15,776,534,500.00
3	Kota Sawahlunto	IUP	4,920,000,000.00	10,262,500.00	4,930,262,500.00
4	Kab. Solok Selatan	IUP	4,400,000,000.00	332,374,000.00	4,732,374,000.00
5	Kab. Lima Puluh Kota	IUP	1,440,000,000.00	301,365,000.00	1,741,365,000.00
6	Kab. Pasaman	IUP	900,000,000.00	39,151,500.00	939,151,500.00
7	Kab. Solok	IUP	-	170,360,000.00	170,360,000.00
8	Kab. Pesisir Selatan	IUP	-	145,172,350.00	145,172,350.00
9	Kab. Agam	IUP	-	51,319,500.00	51,319,500.00
10	Kab. Tanah Datar	IUP	-	6,792,500.00	6,792,500.00
			-	4,610,000.00	4,610,000.00
IV					
Riau					
1	Kab. Indragiri Hulu	IUP, PKP2B	55,290,000,000.00	3,286,244,500.00	58,576,244,500.00
2	Kab. Kuantan Singingi	IUP, PKP2B	44,415,000,000.00	1,439,122,500.00	45,854,122,500.00
3	Kab. Indragiri Hilir	IUP, PKP2B	5,400,000,000.00	921,330,000.00	6,321,330,000.00
4	Kab. Siak	IUP	4,875,000,000.00	206,872,500.00	5,081,872,500.00
5	Kab. Kampar	IUP	600,000,000.00	25,025,000.00	625,025,000.00
6	Kab. Meranti	IUP	-	437,235,000.00	437,235,000.00
7	Kab. Rokan Hulu	IUP	-	117,659,500.00	117,659,500.00
8	Kab. Pelalawan	IUP, PKP2B	-	105,000,000.00	105,000,000.00
			-	34,000,000.00	34,000,000.00

[Handwritten signature and initials]

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Ekpiorasi/Iuran Eksploitas/Royalti atau Iuran Produksi (Rp)	Iuran Tetap (Landrent) (Rp)	Jumlah (Rp)
V	Kepulauan Riau		104,963,000,000.00	2,523,843,500.00	107,486,843,500.00
1	Kab. Karimun	IUP, KK	35,846,000,000.00	1,117,994,000.00	36,963,994,000.00
2	Kota Tanjung Pinang	IUP	35,846,000,000.00	65,280,000.00	35,911,280,000.00
3	Kab. Bintan	IUP	19,035,000,000.00	304,766,500.00	19,339,766,500.00
4	Kab. Lingga	IUP	5,836,000,000.00	466,600,000.00	6,302,600,000.00
5	Pemprov Kepulauan Riau	IUP	8,400,000,000.00	569,203,000.00	8,969,203,000.00
VI	Jambi		50,018,400,000.00	3,229,840,000.00	53,248,240,000.00
1	Kab. Bungo	IUP, PKP2B	40,658,400,000.00	251,801,000.00	40,910,201,000.00
2	Kab. Merangin	IUP	5,700,000,000.00	348,525,500.00	6,048,525,500.00
3	Kab. Batang Hari	IUP, PKP2B	1,600,000,000.00	878,509,500.00	2,478,509,500.00
4	Kab. Tebo	IUP	1,840,000,000.00	166,202,500.00	1,796,202,500.00
5	Kab. Sarolangun	IUP, PKP2B	240,000,000.00	902,134,000.00	1,142,134,000.00
6	Kab. Muaro Jambi	IUP	-	518,892,500.00	518,892,500.00
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	IUP	180,000,000.00	173,775,000.00	353,775,000.00
VII	Sumatera Selatan		414,470,000,000.00	21,397,094,750.00	435,867,094,750.00
1	Kab. Muara Enim	IUP, PKP2B	258,750,000,000.00	5,218,430,000.00	263,968,430,000.00
2	Kab. Lahat	IUP, PKP2B	141,895,000,000.00	1,098,253,000.00	142,993,253,000.00
3	Kab. Ogan Komering Ulu	IUP, PKP2B	13,825,000,000.00	1,455,029,500.00	15,280,029,500.00
4	Kab. Musi Banyuasin	IUP, PKP2B	-	4,290,927,000.00	4,290,927,000.00
5	Kab. Banyuasin	IUP, PKP2B	-	2,913,005,000.00	2,913,005,000.00
6	Kab. Musi Rawas	IUP, PKP2B, KK	-	2,901,545,750.00	2,901,545,750.00
7	Kab. Ogan Komering Ilir	IUP	-	1,852,744,500.00	1,852,744,500.00
8	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	IUP, PKP2B	-	604,700,000.00	604,700,000.00
9	Kab. Empat Lawang	IUP	-	349,710,000.00	349,710,000.00
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	IUP	-	312,070,000.00	312,070,000.00
11	Kab. Ogan Ilir	IUP	-	256,600,000.00	256,600,000.00
12	Kota Prabumulih	IUP	-	148,080,000.00	148,080,000.00
VIII	Kep. Bangka Belitung		391,190,000,000.00	14,973,722,930.00	406,163,722,930.00
1	Kab. Bangka Induk	IUP	103,000,000,000.00	5,900,884,880.00	108,900,884,880.00
2	Kab. Bangka Selatan	IUP, KK	91,802,500,000.00	2,708,585,300.00	94,511,085,300.00
3	Kab. Bangka Tengah	IUP, KK	76,787,500,000.00	1,900,977,250.00	78,688,477,250.00
4	Kab. Bangka Barat	IUP	53,000,000,000.00	2,178,712,500.00	55,178,712,500.00
5	Kab. Belitung Timur	IUP	35,000,000,000.00	1,868,788,000.00	36,868,788,000.00
6	Kab. Belitung Induk	IUP	31,500,000,000.00	495,825,000.00	31,995,825,000.00
7	Kota Pangkal Pinang	IUP	-	119,950,000.00	119,950,000.00
IX	Bengkulu		24,100,000,000.00	1,358,086,200.00	25,458,086,200.00
1	Kab. Bengkulu Tengah	IUP	11,200,000,000.00	49,886,700.00	11,249,886,700.00
2	Kab. Bengkulu Utara	IUP	6,800,000,000.00	545,437,000.00	7,345,437,000.00
3	Kab. Seluma	IUP	4,300,000,000.00	423,065,250.00	4,723,065,250.00
4	Kab. Lebong	IUP	-	219,715,000.00	219,715,000.00
5	Kab. Mukomuko	IUP	-	80,972,500.00	80,972,500.00
6	Kab. Bengkulu Selatan	SIPP	-	18,750,000.00	18,750,000.00
7	Kab. Kaur	SIPP	-	13,759,750.00	13,759,750.00
8	Kab. Kepahiang	IUP	-	6,500,000.00	6,500,000.00
X	Lampung		207,500,000.00	951,486,650.00	1,158,986,650.00
1	Kab. Tanggamus	IUP, KK	102,500,000.00	491,050,650.00	593,550,650.00
2	Kab. Mesuji	IUP	-	178,275,000.00	178,275,000.00
3	Kab. Tulang Bawang	IUP	-	132,392,500.00	132,392,500.00
4	Kab. Lampung Tengah	IUP	52,500,000.00	18,695,000.00	71,195,000.00
5	Kab. Lampung Selatan	IUP	52,500,000.00	18,500,000.00	71,000,000.00
6	Kab. Pesawaran	IUP	-	55,572,000.00	55,572,000.00
7	Kab. Lampung Barat	IUP	-	46,610,250.00	46,610,250.00
8	Kab. Way Kanan	IUP, PKP2B	-	10,391,250.00	10,391,250.00

A
S H B

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalti atau Iuran Produksi (Rp)	Iuran Tetap (Landrent) (Rp)	Jumlah (Rp)
XI Jawa Barat					
1	Kab. Bogor	IUP	39,457,935,000.00	469,087,650.00	39,926,022,650.00
2	Kab. Garut	IUP	39,346,435,000.00	192,326,250.00	39,538,761,250.00
3	Kab. Sukabumi	IUP	25,000,000.00	171,884,000.00	196,884,000.00
4	Kab. Tasikmalaya	IUP	24,000,000.00	47,757,400.00	71,757,400.00
5	Kab. Cianjur	IUP	50,000,000.00	8,265,000.00	58,265,000.00
6	Kab. Bandung Barat	IUP	12,500,000.00	31,520,000.00	44,020,000.00
7	Kab. Purwakarta	IUP	-	13,760,000.00	13,760,000.00
			-	2,575,000.00	2,575,000.00
XII Banten					
1	Kab. Lebak	IUP	188,644,900.00	81,131,000.00	269,775,900.00
2	Kab. Pandeglang	IUP	188,644,900.00	47,631,000.00	236,275,900.00
			-	33,500,000.00	33,500,000.00
XIII Jawa Tengah					
1	Kab. Cilacap	IUP	211,500,000.00	150,660,250.00	362,160,250.00
2	Kab. Wonogiri	IUP	211,500,000.00	18,304,000.00	229,804,000.00
3	Kab. Banyumas	IUP	-	53,813,750.00	53,813,750.00
4	Kab. Pekalongan	IUP	-	47,847,500.00	47,847,500.00
5	Kab. Banjarnegara	IUP	-	14,045,000.00	14,045,000.00
6	Kab. Kebumen	IUP	-	12,370,000.00	12,370,000.00
			-	4,280,000.00	4,280,000.00
XIV Daerah Istimewa Yogyakarta					
1	Kab. Kulonprogo	IUP, KK	-	29,292,950.00	29,292,950.00
			-	29,292,950.00	29,292,950.00
XV Jawa Timur					
1	Kab. Jombang	IUP	1,377,050,000.00	312,767,950.00	1,689,817,950.00
2	Kab. Lumajang	IUP	378,000,000.00	25,501,750.00	403,501,750.00
3	Kab. Pasuruan	IUP	213,750,000.00	12,610,000.00	226,360,000.00
4	Kab. Jember	IUP	183,750,000.00	30,555,750.00	214,305,750.00
5	Kab. Trenggalek	IUP	153,000,000.00	40,808,700.00	193,808,700.00
6	Kab. Banyuwangi	IUP	63,750,000.00	119,075,000.00	182,825,000.00
7	Kab. Pacitan	IUP	182,000,000.00	668,000.00	182,668,000.00
8	Kab. Blitar	IUP	142,800,000.00	29,280,000.00	172,080,000.00
9	Kab. Madiun	IUP	60,000,000.00	2,740,000.00	62,740,000.00
10	Kab. Ponorogo	IUP	-	27,183,750.00	27,183,750.00
			-	24,545,000.00	24,545,000.00
XVI Kalimantan Barat					
1	Kab. Ketapang	IUP	55,658,882,000.00	22,489,321,750.00	78,158,203,750.00
2	Kab. Kapuas Hulu	IUP	44,437,500,000.00	9,873,033,500.00	54,410,533,500.00
3	Kab. Sanggau	IUP	6,250,000,000.00	1,909,500,500.00	8,159,500,500.00
4	Kab. Sintang	IUP, PKP2B, KK	3,750,000,000.00	4,007,433,500.00	7,757,433,500.00
5	Kab. Melawi	IUP	-	1,724,146,000.00	1,724,146,000.00
6	Kab. Landak	IUP	-	1,607,775,000.00	1,607,775,000.00
7	Kab. Kayong Utara	IUP	405,000,000.00	1,118,592,750.00	1,523,592,750.00
8	Kab. Bengkayang	IUP	-	960,325,000.00	960,325,000.00
9	Kab. Sambas	IUP	432,202,000.00	382,327,750.00	814,529,750.00
10	Kab. Kubu Raya	IUP	384,180,000.00	342,217,500.00	726,397,500.00
11	Kab. Sekadau	IUP	-	351,880,000.00	351,880,000.00
12	Kab. Pontianak	IUP	-	68,085,000.00	68,085,000.00
13	Kota Singkawang	IUP	-	36,500,000.00	36,500,000.00
			-	17,505,250.00	17,505,250.00

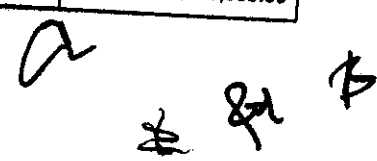
Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalty atau Iuran Produksi (Rp)	Iuran Tetap (Landrent) (Rp)	Jumlah (Rp)
XVII	Kalimantan Tengah				
1	Kab. Murung Raya	IUP, KK, PKP2B	271,497,807,000.00	13,154,122,000.00	284,651,929,000.00
2	Kab. Barito Utara	IUP, PKP2B	125,886,557,000.00	4,193,348,250.00	130,079,905,250.00
3	Kab. Barito Selatan	IUP, PKP2B	43,750,000,000.00	1,872,799,200.00	45,622,799,200.00
4	Kab. Barito Timur	IUP, PKP2B	39,335,000,000.00	1,671,986,000.00	41,006,886,000.00
5	Kab. Kapuas	IUP, KK, PKP2B	25,000,000,000.00	1,227,382,800.00	26,227,382,800.00
6	Kab. Gunung Mas	IUP, KK	15,000,000,000.00	2,407,942,750.00	17,407,942,750.00
7	Kab. Kotawaringin Timur	IUP	7,200,000,000.00	603,575,500.00	7,803,575,500.00
8	Kab. Lamandau	IUP	5,782,500,000.00	136,527,000.00	5,919,027,000.00
9	Kota Palangka Raya	IUP	5,550,000,000.00	341,367,500.00	5,891,367,500.00
10	Kab. Kotawaringin Barat	IUP, KK	1,800,000,000.00	41,359,500.00	1,841,359,500.00
11	Kab. Katingan	IUP, KK	1,293,750,000.00	41,870,250.00	1,335,620,250.00
12	Kab. Seruyan	IUP, KK	900,000,000.00	413,586,750.00	1,313,586,750.00
13	Kab. Sukamara	IUP	-	116,164,000.00	116,164,000.00
14	Kab. Pulang Pisau	IUP	-	82,500,000.00	82,500,000.00
				3,812,500.00	3,812,500.00
XVIII	Kalimantan Selatan				
1	Kab. Balangan	IUP, PKP2B	2,210,305,150,000.00	13,870,587,500.00	2,224,175,737,500.00
2	Kab. Tabalong	IUP, PKP2B	534,974,925,000.00	831,830,500.00	535,806,755,500.00
3	Kab. Tanah Laut	IUP, PKP2B, KK	427,879,940,000.00	1,405,804,500.00	429,385,744,500.00
4	Kab. Banjar	IUP, PKP2B, KK	306,420,380,000.00	1,598,590,900.00	310,016,970,900.00
5	Kab. Kotabaru	IUP, PKP2B, KK	306,230,591,000.00	943,400,400.00	307,173,991,400.00
6	Kab. Tanah Bumbu	IUP, PKP2B, KK	284,117,607,000.00	5,074,428,500.00	289,192,035,500.00
7	Kab. Tapin	IUP, PKP2B	273,049,107,000.00	2,207,151,850.00	275,256,258,850.00
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	IUP, PKP2B	56,251,950,000.00	724,884,250.00	56,976,834,250.00
9	Kota Banjarbaru	KK, PKP2B	19,280,650,000.00	466,300,750.00	19,746,950,750.00
10	Kab. Barito Kuala	IUP	-	261,960,000.00	261,960,000.00
11	Kab. Hulu Sungai Tengah	PKP2B	-	223,715,850.00	223,715,850.00
				134,520,000.00	134,520,000.00
XIX	Kalimantan Timur				
1	Kab. Kutai Timur	IUP, PKP2B	4,670,822,917,000.00	27,134,902,420.00	4,697,957,819,420.00
2	Kab. Kutai Kartanegara	IUP, PKP2B	2,256,786,715,000.00	8,939,368,500.00	2,263,706,083,500.00
3	Kab. Paser	IUP, PKP2B	710,377,028,000.00	8,070,699,970.00	718,447,727,970.00
4	Kab. Kutai Barat	IUP, PKP2B, KK	574,854,747,000.00	1,312,424,200.00	576,267,171,200.00
5	Kab. Berau	IUP, PKP2B	475,639,246,000.00	4,718,965,000.00	480,358,211,000.00
6	Kab. Tana Tidung	IUP, PKP2B	401,974,361,000.00	2,044,234,750.00	404,018,595,750.00
7	Kota Samarinda	IUP, PKP2B	112,420,827,000.00	468,925,000.00	112,887,552,000.00
8	Kab. Penajam Paser Utara	IUP	71,892,585,000.00	401,329,600.00	72,293,914,600.00
9	Kab. Nunukan	IUP, PKP2B	22,500,000,000.00	679,320,000.00	23,179,320,000.00
10	Kab. Malinau	IUP	22,500,000,000.00	437,520,400.00	22,937,520,400.00
11	Kab. Bulungan	IUP, PKP2B	19,500,000,000.00	420,350,000.00	19,920,350,000.00
12	Kota Bontang	PKP2B	2,297,808,000.00	1,618,985,000.00	3,916,593,000.00
				24,780,000.00	24,780,000.00
XX	Nusa Tenggara Barat				
1	Kab. Sumbawa Barat	IUP, KK	135,527,000,000.00	4,486,005,650.00	140,013,005,650.00
2	Kab. Sumbawa	IUP, KK	135,527,000,000.00	1,823,049,000.00	137,350,049,000.00
3	Kab. Bima	IUP, KK	-	1,864,255,000.00	1,864,255,000.00
4	Kab. Dompu	IUP, KK	-	647,598,250.00	647,598,250.00
5	Kab. Lombok Barat	IUP	-	104,459,400.00	104,459,400.00
6	Kab. Lombok Tengah	IUP	-	37,383,000.00	37,383,000.00
				9,281,000.00	9,281,000.00
XXI	Nusa Tenggara Timur				
1	Kab. Belu	IUP	3,640,000,000.00	1,543,989,400.00	5,183,989,400.00
2	Kab. Manggarai Timur	IUP	2,275,000,000.00	900,342,500.00	3,175,342,500.00
3	Kab. Manggarai	IUP	390,000,000.00	125,160,400.00	515,160,400.00
4	Kab. Manggarai Barat	IUP	390,000,000.00	48,242,500.00	438,242,500.00
5	Kab. Timor Tengah Selatan	IUP	195,000,000.00	143,870,000.00	338,870,000.00
6	Kab. Kupang	IUP	195,000,000.00	47,000,000.00	242,000,000.00
7	Kab. Rote Ndao	IUP	195,000,000.00	18,579,000.00	213,579,000.00
8	Kab. Ende	IUP	-	98,782,500.00	98,782,500.00
9	Kab. Alor	IUP	-	83,262,500.00	83,262,500.00
				78,750,000.00	78,750,000.00

A
2 24 7

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalti atau Iuran Produksi (Rp)	Iuran Tetap (Landrent) (Rp)	Jumlah (Rp)
XXII	Sulawesi Utara				
1	Kab. Bolaang Mongondow Timur	IUP, KK	2,570,054,000.00	2,831,660,250.00	5,401,714,250.00
2	Kab. Bolaang Mongondow Utara	IUP, KK	2,570,054,000.00	1,857,930,250.00	4,427,984,250.00
3	Kab. Minahasa Utara	IUP, KK	-	640,092,750.00	640,092,750.00
4	Kab. Minahasa Tenggara	KK	-	149,566,500.00	149,566,500.00
5	Kab. Minahasa Selatan	IUP, KK	-	79,452,500.00	79,452,500.00
6	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	IUP	-	34,795,500.00	34,795,500.00
7	Kab. Bolaang Mongondow	IUP, KK	-	34,000,000.00	34,000,000.00
8	Kota Bitung	KK	-	21,875,000.00	21,875,000.00
9	Kota Manado	KK	-	13,476,750.00	13,476,750.00
			-	471,000.00	471,000.00
XXIII	Gorontalo				
1	Kab. Bone Bolango	IUP, KK	-	991,552,000.00	991,552,000.00
2	Kab. Gorontalo	IUP, KK	-	367,082,250.00	367,082,250.00
3	Kab. Pohuwato	IUP, KK	-	225,165,500.00	225,165,500.00
4	Kab. Gorontalo Utara	IUP	-	204,573,250.00	204,573,250.00
5	Kab. Boalemo	IUP	-	145,731,000.00	145,731,000.00
			-	48,000,000.00	48,000,000.00
XXIV	Sulawesi Tengah				
1	Kab. Morowali	IUP, KK	28,884,179,000.00	5,161,497,200.00	34,045,676,200.00
2	Kab. Banggai	IUP	26,899,224,000.00	2,995,867,250.00	29,895,111,250.00
3	Kab. Parigi Moutong	IUP, KK	1,984,955,000.00	508,216,000.00	2,493,170,000.00
4	Kab. Tojo Una-Una	IUP	-	458,886,000.00	458,886,000.00
5	Kab. Buol	IUP, KK	-	340,927,500.00	340,927,500.00
6	Kab. Poso	IUP	-	320,828,000.00	320,828,000.00
7	Kab. Toli-Toli	IUP, KK	-	185,330,000.00	185,330,000.00
8	Kab. Donggala	IUP, KK	-	135,806,250.00	135,806,250.00
9	Kota Palu	KK	-	91,883,000.00	91,883,000.00
10	Kab. Sigi	IUP, KK	-	91,671,450.00	91,671,450.00
			-	32,082,750.00	32,082,750.00
XXV	Sulawesi Selatan				
1	Kab. Luwu Timur	IUP, KK	65,224,730,650.00	2,961,494,600.00	68,216,225,250.00
2	Kab. Luwu	IUP, KK	65,224,730,650.00	1,870,032,620.00	67,094,763,270.00
3	Kab. Luwu Utara	IUP, KK	-	359,099,100.00	359,099,100.00
4	Kab. Sidenreng Rappang	KK	-	264,192,000.00	264,192,000.00
5	Kab. Bone	IUP	-	139,702,500.00	139,702,500.00
6	Kab. Enrekang	IUP, KK	-	63,495,300.00	63,495,300.00
7	Kab. Maros	IUP	-	63,083,400.00	63,083,400.00
8	Kota Palopo	IUP	-	61,265,000.00	61,265,000.00
9	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	IUP	-	54,408,000.00	54,408,000.00
10	Kab. Tana Toraja	IUP	-	42,624,500.00	42,624,500.00
11	Kab. Takalar	IUP	-	18,000,000.00	18,000,000.00
12	Kab. Sinjai	IUP	-	15,355,580.00	15,355,580.00
13	Kab. Wajo	KK	-	13,969,000.00	13,969,000.00
14	Kab. Toraja Utara	IUP	-	9,775,500.00	9,775,500.00
15	Kab. Jeneponto	IUP	-	6,000,000.00	6,000,000.00
16	Kab. Barru	IUP	-	5,382,000.00	5,382,000.00
			-	5,110,100.00	5,110,100.00
XXVI	Sulawesi Barat				
1	Kab. Mamuju Utara	IUP	-	52,342,500.00	52,342,500.00
2	Kab. Mamasa	IUP	-	27,500,000.00	27,500,000.00
3	Kab. Mamuju	IUP	-	22,392,500.00	22,392,500.00
			-	2,450,000.00	2,450,000.00
XXVII	Sulawesi Tenggara				
1	Kab. Kolaka	IUP, KK	49,971,681,950.00	6,340,939,450.00	56,312,621,400.00
2	Kab. Bombana	IUP, KK	32,828,098,950.00	695,060,250.00	33,523,159,200.00
3	Kab. Buton	IUP	10,908,774,000.00	786,425,750.00	11,695,199,750.00
4	Kab. Konawe	IUP, KK	4,801,220,500.00	394,207,500.00	5,195,428,000.00
5	Kab. Konawe Utara	IUP	831,311,000.00	1,548,052,250.00	2,379,363,250.00
6	Kab. Kolaka Utara	IUP, KK	-	2,076,423,300.00	2,076,423,300.00
7	Kab. Konawe Selatan	IUP, KK	602,277,500.00	368,817,250.00	971,094,750.00
8	Kab. Buton Utara	IUP	-	389,039,150.00	389,039,150.00
9	Kab. Muna	IUP	-	76,941,000.00	76,941,000.00
			-	5,973,000.00	5,973,000.00



No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalty atau Iuran Produksi (Rp)	Iuran Tetap (Landrent) (Rp)	Jumlah (Rp)
XXVIII	Maluku				
1	Kab. Maluku Barat Daya	IUP	15,120,000,000.00	923,743,500.00	16,043,743,500.00
2	Kab. Seram Bagian Barat	IUP	15,120,000,000.00	450,847,500.00	15,570,847,500.00
3	Kab. Maluku Tenggara Barat	IUP	-	270,340,000.00	270,340,000.00
4	Kab. Maluku Tengah	IUP	-	158,823,500.00	158,823,500.00
			-	43,732,500.00	43,732,500.00
XXIX	Maluku Utara				
1	Kab. Halmahera Timur	IUP	84,507,411,500.00	5,036,523,500.00	89,543,935,000.00
2	Kab. Halmahera Utara	IUP, KK	44,160,395,500.00	1,488,782,500.00	45,647,178,000.00
3	Kab. Halmahera Selatan	IUP	30,651,275,000.00	1,313,198,450.00	31,964,473,450.00
4	Kab. Halmahera Tengah	IUP, KK	7,834,441,500.00	211,953,050.00	7,846,394,550.00
5	Kab. Kepulauan Sula	IUP	2,061,299,500.00	604,131,250.00	2,665,430,750.00
6	Kab. Halmahera Barat	IUP	-	1,236,293,250.00	1,236,293,250.00
7	Kab. Morotai	IUP	-	124,680,000.00	124,680,000.00
			-	59,485,000.00	59,485,000.00
XXX	Papua				
1	Kab. Mimika	IUP, KK	1,483,244,500,000.00	6,153,058,500.00	1,489,397,558,500.00
2	Kab. Paniai	IUP, KK	1,483,244,500,000.00	1,391,558,500.00	1,484,636,058,500.00
3	Kab. Sarmi	IUP, KK	-	1,332,594,000.00	1,332,594,000.00
4	Kab. Nabire	IUP, KK	-	878,582,250.00	878,582,250.00
5	Kab. Puncak Jaya	KK	-	709,157,000.00	709,157,000.00
6	Kab. Keerom	IUP, KK	-	439,324,250.00	439,324,250.00
7	Kab. Tolikara	KK	-	426,337,500.00	426,337,500.00
8	Kab. Waropen	IUP, KK	-	300,436,500.00	300,436,500.00
9	Kab. Pegunungan Bintang	KK	-	184,852,500.00	184,852,500.00
10	Kab. Jayapura	IUP	-	158,812,500.00	158,812,500.00
11	Kab. Jayawijaya	IUP, KK	-	146,565,000.00	146,565,000.00
12	Kab. Kepulauan Yapen	IUP	-	109,885,500.00	109,885,500.00
			-	74,955,000.00	74,955,000.00
XXXI	Papua Barat				
1	Kab. Raja Ampat	IUP, KK	10,509,782,000.00	1,070,578,500.00	11,580,360,500.00
2	Kab. Kaimana	KK	10,509,782,000.00	125,814,000.00	10,635,596,000.00
3	Kab. Sorong	IUP	-	566,811,000.00	566,811,000.00
4	Kab. Manokwari	IUP	-	186,421,500.00	186,421,500.00
5	Kab. Sorong Selatan	IUP	-	66,636,000.00	66,636,000.00
6	Kab. Teluk Bintuni	IUP	-	41,700,000.00	41,700,000.00
7	Kab. Fakfak	IUP	-	43,821,000.00	43,821,000.00
			-	36,375,000.00	36,375,000.00
Jumlah			10,196,700,000,000.00	168,500,000,000.00	10,365,200,000,000.00

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


DARWIN ZAHEDY SALEH

Handwritten initials/signature

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 0218 K/80/MEM/2011
 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2011

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN
 DAERAH PENGHASIL SUB SEKTOR PERTAMBANGAN PANAS BUMI
 UNTUK TAHUN 2011

No.	Area / Kabupaten	Pengembang	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
I.	Gunung Salak	Chevron Geothermal Salak, Ltd	
1	Kabupaten Sukabumi		43.63
2	Kabupaten Bogor		56.37
II.	Darajat	Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	
1	Kabupaten Garut		95.11
2	Kabupaten Bandung		4.89
III.	Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energi (PGE)	
1	Kabupaten Bandung		75.54
2	Kabupaten Garut		24.46

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


 DARWIN ZAHEDY SALEH

Handwritten initials or mark

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 0218 K/80/MEM/2011
 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2011

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
 BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUB SEKTOR MINYAK BUMI
 UNTUK TAHUN 2011

NO.	WILAYAH /PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (RIBU BAREL)
A.	0 - 4 MIL LAUT		296,057.88
I.	Nanggroe Aceh Darussalam		1,968.54
		1. Aceh Timur	6.45
		2. Aceh Utara	1,240.84
		3. Aceh Tamiang	721.25
II.	Sumatera Utara		258.78
		4. Langkat	200.66
		5. Binjai	57.80
		6. Deli Serdang	0.32
III.	Riau		145,916.98
		7. Bengkalis	79,073.39
		8. Indragiri Hulu	633.58
		9. Kampar	14,331.82
		10. Rokan Hulu	645.74
		11. Rokan Hilir	21,421.98
		12. Siak	27,155.73
		13. Palalawan	506.16
		14. Kepulauan Meranti	2,148.58
IV.	Kepulauan Riau		24,382.00
		15. Natuna	15,848.30
		16. Kepulauan Anambas	8,533.70
V.	Jambi		10,538.03
		17. Batang Hari	454.24
		18. Muaro Jambi	1,144.19
		19. Kota Jambi	635.85
		20. Tanjung Jabung Timur	1,596.51
		21. Tanjung Jabung Barat	4,754.49
		22. Sarolangun	1,405.25
		23. Tebo	547.50
VI.	Sumatera Selatan		29,785.35
		24. Lahat	580.54
		25. Muara Enim	8,995.95
		26. Kota Prabumulih	685.36
		27. Musi Banyuasin	12,367.75
		28. Banyuasin	1,026.93
		29. Musi Rawas	3,463.00
		30. Ogan Ilir	459.96
		31. Ogan Komering Ulu	2,205.86
VII.	Lampung		2,588.52
		32. Lampung Timur	
VIII.	DKI Jakarta		2,874.91
		33. DKI Jakarta	

A
 b SA 8

NO.	WILAYAH /PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (RIBU BAREL)
IX.	Jawa Barat	34. Indramayu	7,853.48
		35. Karawang	1,846.99
		36. Majalengka	902.28
		37. Subang	29.37
		38. Bekasi	165.88
		39. Bkasi	4,908.96
X.	Jawa Tengah	39. Blora	295.40
XI.	Jawa Timur	40. Bojonegoro	24,633.04
		41. Bangkalan	21,650.35
		42. Sumenep	195.69
		43. Tuban	861.38
		44. Gresik	845.22
		45. Tabalong	1,080.40
XII.	Kalimantan Selatan	46. Balangan	1,750.86
		47. Balangan	1,572.16
XIII.	Kalimantan Timur	48. Bulungan	178.70
		49. Nunukan	35,285.65
		50. Kota Tarakan	884.17
		51. Kota Samarinda	620.50
		52. Kutai Kertanegara	791.35
		53. Kutai Timur	93.57
		54. Panajam Paser Utara	29,767.59
		55. Kota Bontang	1,171.28
		56. Morowali	1,225.12
		57. Morowali	732.07
XIV.	Sulawesi Tengah	58. Seram Bagian Timur	1,350.50
XV.	Maluku	59. Raja Ampat	912.50
XVI.	Papua Barat	60. Teluk Bintuni	5,663.34
		61. Sorong	1,971.00
		62. Raja Ampat	3,662.20
		63. Raja Ampat	30.14
B.	4 - 12 MIL LAUT	64. Lampung	33,874.40
		65. Kepulauan Bangka Belitung	4,509.32
		66. Jawa Barat	634.64
		67. Kalimantan Timur	5,810.63
		68. Kepulauan Riau	19,037.53
		69. Jawa Timur	730.00
C.	> 12 MIL LAUT	70. PEMERINTAH PUSAT	3,152.28
		71. PEMERINTAH PUSAT	24,117.68

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


DARWIN ZAHEDY SALEH

A B &

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 0218 K/80/MEM/2011
 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2011

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
 BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUB SEKTOR GAS BUMI
 UNTUK TAHUN 2011

NO.	WILAYAH /PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (RIBU MMBTU)
A.	0 - 4 MIL LAUT		2,115,118.26
I.	Nanggroe Aceh Darussalam	1. Aceh Timur 2. Aceh Utara	65,075.05 3,080.60 61,994.45
II.	Sumatera Utara	3. Langkat 4. Binjai 5. Deli Serdang	8,169.55 5,947.15 1,696.02 526.38
III.	Riau	6. Kota Pekanbaru 7. Palalawan	6,570.00 2,920.00 3,650.00
IV	Kepulauan Riau	8. Natuna 9. Kepulauan Anambas	169,647.01 110,270.56 59,376.45
V.	Jambi	10. Batang Hari 11. Tanjung Jabung Timur 12. Tanjung Jabung Barat 13. Kota Jambi	95,393.17 24,472.19 29,740.30 41,171.55 9.13
VI.	Sumatera Selatan	14. Lahat 15. Muara Enim 16. Kota Prabumulih 17. Musi Banyuasin 18. Musi Rawas 19. Ogan Komering Ulu	571,256.42 17,050.65 49,256.49 360.92 337,653.74 163,066.51 3,868.11
VII.	DKI Jakarta	20. DKI Jakarta	13,322.50
VIII.	Jawa Barat	21. Indramayu 22. Karawang 23. Majalengka 24. Subang 25. Bekasi	149,419.68 12,585.93 48,691.70 870.98 73,128.72 14,142.35

a

82

NO.	WILAYAH /PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (RIBU MMBTU)
IX.	Jawa Timur	26. Sumenep	37,583.13
		27. Sidoarjo	6,208.65
		28. Gresik	3,504.00
		29. Bangkalan	21,900.00
		30. Bojonegoro	1,552.48
			4,418.00
X.	Jawa Tengah	31. Kota Semarang	1,108.26
		32. Blora	934.09
			174.17
XI.	Kalimantan Timur	33. Kota Tarakan	649,772.29
		34. Kota Samarinda	3,029.50
		35. Kutai Kertanegara	6,995.17
		36. Panajam Paser Utara	631,960.92
		37. Kota Bontang	696.17
		38. Nunukan	6,178.03
		39. Tana Tidung	46.00
			866.50
XII.	Kalimantan Tengah	40. Barito Utara	3,650.00
XIII.	Sulawesi Selatan	41. Wajo	12,045.00
XIV.	Papua Barat	42. Sorong	332,106.20
		43. Teluk Bintuni	730.00
			331,376.20
B.	4 - 12 MIL LAUT		
I.	Jawa Barat		558,708.89
			34,595.47
			384,362.57
			45,846.00
			80,582.35
II.	Kalimantan Timur		13,322.50
III.	Kepulauan Riau		
IV.	Jawa Timur		
V.	Lampung		
C.	> 12 MIL LAUT	PEMERINTAH PUSAT	161,856.44

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


DARWIN ZAHEDY SALEH

Handwritten initials